



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUMINI YULIASTUTI, S.E., MM.  
 Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RUSTAM EFFENDI  
 Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
 Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Februari 2015

**Pihak Kedua**  
**GUBERNUR**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**RUSTAM EFFENDI**

**Pihak Pertama**  
**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**




**SUMINI YULIASTUTI, S.E., MM.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19581212 200810 2 003**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

### BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Optimalnya penerapan Pengaruutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan	Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG	14% (6 dari 43 SKPD)
		Persentase SKPD yang memiliki data terpilah	18,6% (8 dari 43 SKPD)
			7 Instansi Vertikal
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan	31 Lembaga
2.	Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan peran serta posisi perempuan	Jumlah Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan	1 Kebijakan
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	6,02%
		Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	6,46%
3.	Optimalnya kerjasama lintas sektoral dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	4 Kebijakan
		Jumlah Instansi yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	11 Instansi

		Jumlah Kabupaten Kota yang Membentuk Kota Layak Anak (KLA)	1 Kab/Kota
4.	Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas	Jumlah Kebijakan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga	1 Kebijakan
		Tingkat Prevalensi Peserta KB Aktif	78,74%
		Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	11,69%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Rp. 673.168.800,-	
2. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Rp. 1.373.363.400,-	
3. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp. 1.144.057.800,-	
4. Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga	Rp. 759.945.000,-	

Pangkalpinang, Februari 2015

**GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**RUSTAM EFFENDI**

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**




**SUMNI YULIASTUTI, S.E., MM.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19581212 200810 2 003